

ANALISIS PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KOTA PALEMBANG

M Hatta Iskandar

Mahasiswa Kependudukan Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya
Jalan Padang Selasa No.524, Bukit Besar Palembang 30139

E-mail: bung_ht@yahoo.co.id

ABSTRAK. Pada penulisan ini, penulis menemukan permasalahan tentang sudut pandang dari beberapa aspek pada permasalahan kemiskinan yang sebenarnya. Dengan konsep pembangunan mengatasi masalah kemiskinan, untuk menjalankan strategi penanggulangan kemiskinan nasional di Indonesia. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan program pemberdayaan masyarakat melalui simpan pinjam, yang diharapkan berdampak pada penurunan angka kemiskinan. Pada penulisan ini menggunakan kajian yang dilakukan dengan pendekatan studi literatur. Sifat kajian eksploratif-deskriptif. Sumber data berasal dari pustaka primer melalui jurnal dan pustaka sekunder buku-buku yang relevan, publikasi institusi, artikel populer yang sebagian diperoleh secara *online*. Penulisan ini memberikan hasil bahwa upaya-upaya untuk mengatasi permasalahan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat melalui simpan pinjam di Indonesia sangatlah mempunyai kelebihan atau kekuatan, dan kekurangan, mulai dari masalah internal dan masalah eksternal yang berujung pada lunturnya nilai-nilai luhur kemanusiaan, rendahnya kepedulian dan ketrampilan sumber daya manusia. Sesuai dengan kondisi Indonesia sekarang sebagai upaya perbaikan dalam menanggulangi masalah kemiskinan, kemudian untuk menekan angka kemiskinan dapat dilaksanakan program penanggulangan kemiskinan yang lebih *pro poor planning and budgeting*, sehingga dapat menuju kemandirian masyarakat yang madani. Keadaan Indonesia yang memiliki jumlah rumah tangga miskin yang tinggi harus dikurangi karena semakin banyak jumlah warga miskin akan menjadi beban dan permasalahan negara.

Kata-kata kunci : Prespektif, Kemiskinan, Pemberdayaan Kemitraan

PENDAHULUAN

Program pemberdayaan masyarakat di Kota Palembang adalah program yang pada dasarnya merupakan upaya pemecahan masalah untuk menanggulangi kemiskinan. Pemecahan masalah yang dilakukan oleh program pemberdayaan masyarakat tentu saja berdasarkan masalah-masalah yang sudah dianalisis sebelumnya.

Program Pemberdayaan Masyarakat di Palembang sebagai upaya penanggulangan kemiskinan, melakukan pendampingan proses pembelajaran masyarakat melalui penyadaran kritis agar dapat memecahkan masalah sendiri, salah satunya permodalan. Proses perubahan yang diharapkan terjadi adalah dari kondisi masyarakat yang tidak berdaya, menjadi mandiri dan pada satu saat akan menjadi masyarakat madani mampu mengola simpan pinjam.

Masyarakat yang tidak berdaya, warga miskin dan perempuan, harus dimampukan dengan memberikan pengetahuan, meningkatkan keterampilan, mendapat sumber daya dan merubah pola pikir mereka sehingga menjadi masyarakat

yang berdaya melalui proses pemberdayaan. Di lain pihak kelompok yang selama ini mempunyai sumber kekuasaan tadi (kelompok dominan) harus mau membagikan pengetahuan, informasi, dan sumber dayanya bagi kelompok yang lain.

Kepedulian, sikap mau berbagi, keikhlasan menjadi landasan untuk membangun kebersamaan (solidaritas sosial) yang menjadi kontrol/landasan dari terciptanya ikatan-ikatan yang didasarkan saling percaya (modal sosial). Dengan demikian sikap mental dan pola pikir kita menjadi bagian yang utama untuk mengatasi permasalahan kemiskinan. Kedua hal inilah yang coba dipecahkan oleh Program Pemberdayaan Masyarakat di Palembang, karena pada dasarnya pendampingan yang dilakukan oleh Program Pemberdayaan Masyarakat di Palembang berusaha untuk menggali dan menumbuhkan sikap mental yang positif sesuai dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan dan membongkar paradigma-paradigma mengenai manusia (pembangunan manusia) yang keliru di segala aspek kehidupan termasuk dalam perkembangan perekonomian.

Oleh karena hal tersebut di atas, maka pendekatan pemberdayaan yang dipakai oleh Program Pemberdayaan Kota Palembang adalah pemberdayaan sejati, dengan salah satu kegiatan pemberdayaan ekonomi melalui simpan pinjam. Pendekatan ini menekankan pada proses pemberdayaan agar manusia mampu menggali nilai-nilai baik yang telah dimiliki dan mampu menggunakannya secara merdeka (tidak tergantung kepada pendapat pihak lain yang keliru) sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan dan fitrahnya sebagai manusia.

Untuk menjamin keberlanjutan pengorganisasian masyarakat, dibutuhkan wadah (lembaga) dengan gugus tugas lembaga simpan pinjam salah satunya, yang dimotori oleh pengelola-pengelola yang mempunyai nilai-nilai kebaikan (sikap mental yang positif) dan kerelawanan yang tinggi. Artinya relawan-relawan tersebut haruslah merupakan representasi dari nilai-nilai kemanusiaan. Diharapkan para relawan yang jujur, adil, ikhlas, amanah akan mampu menjadi motor penggerak proses penanggulangan kemiskinan di kelurahan di Palembang dengan dilandasi prinsip-prinsip keadilan (keputusan yang dikeluarkan tidak berpihak), keterbukaan (transparan), bertanggung jawab (akuntabel), keputusan tidak didasari oleh kepentingan-kepentingan pribadi atau golongan, memberikan kesempatan dan hak yang sama kepada seluruh masyarakat untuk terlibat dalam keseluruhan kegiatan dan sebagainya.

Terlaksananya proses di atas harus dibarengi dengan perubahan pola pikir (paradigma) sehingga keterlibatan seluruh pelaku pembangunan dalam proses penanggulangan kemiskinan bukan semata-mata karena proyek atau bahkan untuk mengejar Bantuan Langsung Masyarakat, akan tetapi merupakan keterlibatan yang didasari oleh kesadaran kritis.

Isu-isu keberhasilan dan kekurangan program pemberdayaan masyarakat melalui simpan pinjam sebagai kekuatan untuk keberlangsungan dan kelemahan untukantisipasi program-program kedepan. Untuk itu kami mengkaji ulang dalam kajian literatur lalu dilakukan SWOT untuk ditarik kesimpulan tentang kekuatan dan kelemahan program pemberdayaan masyarakat melalui simpan pinjam di Kota Palembang.

METODE

Penelitian dengan judul analisis pemberdayaan masyarakat melalui simpan pinjam

di Kota Palembang merupakan penelitian dibidang kependudukan. Dengan menggunakan kajian yang dilakukan dengan pendekatan studi literatur. Sifat kajian eksploratif-deskriptif. Sumber-sumber data berasal dari laporan kegiatan kordinatro Kota PNPM perkotaan Palembang, pustaka primer melalui jurnal, pustaka sekunder buku-buku yang relevan, publikasi institusi, artikel populer yang sebagian diperoleh secara *online*. Pemilihan data didasarkan pada indikator yang digunakan dalam kajian publikasi institusi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kajian data

Dari data yang tersaji dalam laporan bulanan Assiten Manajemen Keuangan Koordinator Kota Palembang konsultan manajemen wilayah menunjukkan Pembangunan perkembangan dalam hal *asset financial*, dan modal sosial, yang terbukti suah terkumpulnya dana simpan pinjam sebesar Rp 10.000.000.000,-.

Penulisan ini menggunakan kajian yang dilakukan dengan pendekatan SWOT (*Strong, weaknes, Opportunity, Treathment*). Sumber data berasal dari data laporan keuangan dan pendapat langsung stakeholder, data didasarkan pada indikator yang digunakan dalam program pemberdayaan.

A. Metode Analisis SWOT

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis SWOT. SWOT merupakan *Strength, Weakness, Opportunity and Threat* (Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman). Analisis SWOT adalah jабaran dari manajemen strategik dengan prinsip "*inside out*". Dalam analisis ini, kekuatan dan keleahan merupakan faktor internal, sedangkan peluang dan ancaman merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi. Kegunaan dari analisis SWOT ini antara lain:

- Untuk mengidentifikasi kekuatan dan peluang dan mencari jalan bagaimana untuk mengoptimalkannya, serta mengidentifikasi kelemahan dan ancaman supaya dapat dicari cara mengatasinya.
- Analisis SWOT merupakan salah satu bagian dari penyusunan rencana strategis. Sebelum menjabarkan analisis SWOT dengan langkah-langkahnya, maka hal paling utama yang harus diputuskan adalah siapakah *stakeholder* utama. Penentuan ini sangat penting karena kita sering menghadapi banyak *stakeholder* dan seringkali tujuan utamanya sering bertentangan.

- Analisis hasil yang diperoleh dengan pertanyaan:
 1. Apa saja kekuatan program pemberdayaan masyarakat melalui simpan pinjam dapat berjalan baik.
 2. Apa saja kelemahan program pemberdayaan masyarakat melalui simpan pinjam.

PEMBAHASAN

Lembaga Keuangan Mikro

Salah satu dari penyebab kemiskinan adalah terbatasnya akses untuk memperoleh modal, baik itu modal usaha, maupun modal sosial dan politik. Penduduk miskin kota yang mayoritas merupakan masyarakat miskin memiliki keterbatasan dalam memperoleh pemodalannya tersebut. Pinjaman modal dari perbankan sulit didapat oleh para penduduk miskin, hal itu dikarenakan tidak adanya harta benda lain (selain uang) yang bisa mereka jadikan agunan di bank sehingga masyarakat miskin tidak mendapatkan pinjaman modal dari perbankan menjadikan mereka lebih memilih meminjam kepada renternir untuk mendapatkan modal.

Dari 107 Kelurahan di Kota Palembang belum ada lembaga simpan pinjam yang mendapatkan dana tambahan simpan pinjam bagi warga miskin yang di kelola Unit Pengelola Keuangan Program Pemberdayaan Masyarakat.

Lingkaran setan yang melahirkan jebakan ketidakberdayaan inilah yang menjadikan alasan penting mengapa lembaga keuangan mikro yang menyediakan pembiayaan bagi usaha mikro dan masyarakat miskin menempati tempat yang sangat strategis.

Pada awalnya, konsep pembiayaan mikro (*microfinance*) lahir sebagai suatu terobosan bagi penyediaan jasa keuangan kepada masyarakat berpendapatan rendah yang tidak memiliki akses kesistem keuangan modern. Keberadaan lembaga keuangan mikro untuk mengatasi hal itu sangat berarti bagi masyarakat miskin khususnya di kantong-kantong kemiskinan. Sejak jaman dahulu, keberadaan lembaga keuangan mikro menjadi alternatif bagi kelompok berpenghasilan rendah dalam memenuhi kebutuhan dana mereka. Lembaga Keuangan Mikro terdiri dari berbagai macam jenis yang merupakan lembaga perkereditan rakyat. Tujuan dari pembangunan lembaga perkereditan rakyat tersebut adalah untuk menyediakan kemudahan permodalan bagi masyarakat berpenghasilan rendah guna mengembangkan usaha dan kemampuannya (Widodo, 1987).

Lebih lanjut, Widodo menjelaskan bahwa lembaga perkereditan rakyat yang ada di berbagai daerah perlu mendapatkan legalitas hukum dari pihak

yang berwenang, hal itu dimaksudkan agar, lembaga tersebut dapat memperluas dan memperkuat kegiatannya bukan hanya sebagai penyalur kredit, tetapi juga sebagai penghimpun tabungan masyarakat dan pemberdayaan usaha masyarakat. Selanjutnya, dijelaskan bahwa lembaga perkereditan, pembangunannya dilakukan dengan cara:

1. Meletakkan dasar dan kekuatan hukum lembaga tersebut.
2. Bantuan modal dasar yang bersumber dari dana APBD.
3. Memberikan bekal kemampuan dan keterampilan bagi para pengelola lembaga, sebelum dan sesudah didirikan.
4. Memberikan bimbingan, pengarahan, pembinaan, dan pemantauan baik secara umum oleh pemda maupun secara teknis oleh BPD.

Menurut definisi yang dipakai dalam *Microcredit Summit* (1997) dalam Wijono (2005), kredit mikro adalah pemberian kredit dalam jumlah kecil kepada warga miskin untuk membiayai kegiatan produktif yang dia kerjakan sendiri agar menghasilkan pendapatan, yang memungkinkan mereka untuk peduli terhadap diri sendiri dan keluarganya. Asian Development Bank (ADB) mendefinisikan lembaga keuangan mikro sebagai lembaga yang menyediakan jasa penyimpanan (*Deposit*), Kredit (*Loan*), pembayaran berbagai transaksi jasa (*Payment Services*), serta *money transfers* yang ditunjukkan bagi masyarakat miskin dan pengusaha kecil. Dengan demikian lembaga keuangan mikro memiliki fungsi sebagai lembaga yang memberikan berbagai jasa keuangan bagi masyarakat berpenghasilan rendah serta usaha mikro.

Menurut Krishnamurti dalam Susila (2007), meskipun banyak terdapat definisi keuangan mikro, namun secara umum terdapat tiga elemen penting dari berbagai definisi tersebut, yaitu:

1. Menyediakan beragam jenis keuangan, seperti tabungan, pinjaman, deposito, pembayaran, maupun asuransi.
2. Melayani masyarakat miskin. Keuangan mikro pada awalnya hidup dan berkembang dikalangan rakyat yang terpinggirkan oleh system keuangan formal yang ada.
3. Menggunakan prosedur dan mekanisme yang kontekstual dan fleksibel. Hal ini merupakan konsekuensi dari masyarakat yang dilayani, sehingga prosedur dan mekanisme yang dikembangkan untuk keuangan mikro akan selalu kontekstual dan fleksibel.

Tumbuh dan berkembangnya lembaga keuangan mikro di Indonesia diilhami oleh keberhasilan Yunus dalam Ruben (2007) dalam

mengembangkan *Credit Union* di Banglades yang terkenal dengan Grameen Bank (GB). Banyak orang melihat model GB sebagai suatu model pendekatan yang sukses dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan peran perempuan. Melihat kesuksesan GB, banyak pihak yang mereplikasi metode GB terutama pada metode penyaluran pinjaman yang dilakukan kepada pengguna, tetapi tanpa mereplikasi sistem peningkatan kesejahteraan masyarakatnya yang berupa penyediaan layanan simpanan kecil dan penyediaan jaminan sosial. Bagi Indonesia, keuangan mikro bukan menjadi hal yang baru, Menurut Wijono (2005), lembaga keuangan mikro pada masyarakat sudah banyak dibentuk dan tersebar mulai dari perkotaan sampai perdesaan, atas prakarsa pemerintah, swasta maupun kalangan lembaga swadaya masyarakat dalam bentuknya yang formal, non formal, sampai informal dengan karakteristiknya masing-masing.

Berdasarkan bentuknya, lembaga keuangan mikro dibagi menjadi tiga (Wijono, 2005) yaitu: (1) Lembaga formal seperti bank desa dan koperasi. (2) Lembaga semi formal, misalnya organisasi non pemerintah. (3) Sumber-sumber informal, misalnya pelepas uang. Banyak pihak meyakini lembaga keuangan mikro sebagai suatu alat pembangunan yang efektif untuk mengentaskan kemiskinan karena layanan keuangan memungkinkan orang kecil dan rumah tangga berpenghasilan rendah untuk memanfaatkan peluang ekonomi, membangun aset dan mengurangi kerentanan terhadap guncangan eksternal. Lembaga keuangan mikro menjadi alat yang cukup penting untuk mewujudkan pembangunan dalam tiga hal sekaligus, yaitu: menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mengentaskan kemiskinan (Hendayana dan Bustaman, 2007). Untuk itu di kelurahan-kelurahan di kota Palembang di bentuklah Unit Pengelola Keuangan (UPK).

Dalam program pemberdayaan masyarakat di Palembang usaha simpan pinjam dapat memenuhi kebutuhan warga yang membutuhkan, pinjaman yang dapat diberikan oleh UPK kepada warga berkisar dari Rp. 500.000,- sampai Rp. 3.000.000,- pinjaman tersebut sangat membantu selain dapat diangsur tiap bulannya dengan jasa/bunga sebesar 1,5 %, apabila telah lewat 1 tahun, jika mengalami keterlambatan dikenakan sanksi wilayah, berbeda dengan peminjaman di renternir, dengan bunga sebesar 30%-50% dalam setahun, apabila tidak dapat melunasi dalam jangka waktu setahun, maka dikenakan bunga sebesar 30%-50% lagi.

Sementara warga yang belum mendapatkan pinjaman dari Unit Pengelola Keuangan mengandalkan pekerjaan yang mereka miliki, warga lainnya mengandalkan pinjaman dari renternir dengan bunga cukup tinggi. Kelompok yang lancar dapat mengajukan kembali sementara kelompok yang menunggak tidak dapat mengajukan sebelum melunasi tunggaknya.

HASIL

Melalui data yang dianalisis dengan analisis *SWOT* kemudian dikaitkan dengan teori yang telah disebutkan dan juga data dari instansi terkait menghasilkan :

A. Kekuatan Pemberdayaan masyarakat melalui simpan Pinjam

Masyarakat dapat turut berpereran berperan dalam pembagunan melalui pemberdayaan masyarakat, relawan bersedia mengikuti pelatihan-pelatihan walaupun tanpa ada honor. Keberadaan Lembaga Keswadayaan Masyarakat dan Unit-Unit Pengelola diakui oleh masyarakat dapat bermitra dengan pelaku pembangunan lokal. Hal tersebut terlihat dari keinginan warga untuk berpartisipasi didalamnya.

Terbentuk lembaga dengan salah satu gugus tugas Unit Pengelola Keuangan yang terfokus kepada usaha simpan pinjam yang telah memberikan bantuan kepada masyarakat, warga memanfaatkan usaha simpan pinjam tersebut untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup mereka dalam mengembangkan usaha masyarakat. Sehingga pengelolaan keuangan dan simpan pinjam dapat berjalan.

Terbentuknya lembaga yang aspiratif yang di pilih dan dikelola oleh masyarakat setempat, dengan latar belakang pendidikan tidak terlalu tinggi setelah di bekal dengan *capacity building*, dan ketrampilan warga mampu mengelola kegiatan perekonomian simpan pinjam.

Telah tersusunnya program kegiatan dengan salah satu kegiatan pemberdayaan ekonomi simpan pinjam yang diharapkan dapat terus berjalan yang di review dan dilaporkan pertanggung jawabannya kepada masyarakat setiap tahun dalam dalam rembug masyarakat.

B. Dampak Negatif Kelemahan Pemberdayaan masyarakat melalui simpan Pinjam

Terjadi tingkat tunggakan yang dapat berakibat menular pada kelompok-kelompok simpan pinjam yang lancar, hal ini seperti virus yang dapat menular. Jika dibiarkan dalam jangka

waktu yang lama dapat berakibat pada tertundanya program-program pemberdayaan lanjutan untuk masuk ke masing-masing lokasi tersebut.

SIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil pembahasan ini pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat melalui simpan pinjam dapat memberikan motivasi dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan ekonomi, juga menambah ketrampilan dalam pengelolaan keuangan. Jangka panjang dapat menjadi lembaga keuangan yang besar. Namun sangat beresiko jika terjadi tunggakan. Untuk itu perlu sangat teliti dan hati-hati dalam proses verifikasi dan penyeleksian calon peminjam. Salah satu kunci keberhasilan juga para pengelola yang benar-benar baik dan murni serta memiliki kerelawanan yang tinggi.

Salah satu kelemahan mendasar dari lembaga keuangan mikro non formal atas prakarsa program pemerintah adalah lemahnya pengetahuan masyarakat dalam memahami bahwasannya bantuan tersebut adalah untuk pemodal dan pembiayaan untuk usaha agar masyarakat menjadi produktif, selama ini masyarakat miskin menganggap bantuan pemerintah hanya sebagai hibah sehingga dana yang diberikan digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang tidak seharusnya, hal-hal tersebut yang harus dapat dihindari guna keberlangsungan lembaga keuangan mikro di masyarakat, untuk itulah sosialisasi program kepada masyarakat merupakan hal yang penting untuk membentuk sebuah lembaga di komunitas, dan akan lebih baik lagi, apabila dalam pembentukan lembaga yang menjalankan program pemerintah, pelakunya adalah masyarakat dari daerah itu sendiri, setelah diberikan pengarahan, pendidikan, dan keterampilan. Hal ini dikarenakan mereka lebih mengetahui kultur dan kebudayaan masyarakat daerahnya sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Hendayana, Rachmat. Dkk. 2007. Fenomena Keuangan Mikro dalam Perspektif Pembangunan Ekonomi Perdesaan. Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian. Bogor: Jurnal Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian
- Ruben, Matthew. 2007. The Promise of Microfinance for Poverty Relief in the Developing World. Proquest CSA LLC.
- Susila, Ihwan. 2007. Analisis Efisiensi Lembaga Keuangan Mikro. Jurnal Ekonomi Pembangunan vol. 8 No.2 Desember 2007.

Wijono, Wiloejo Wirjo. 2005. Mengungkap Sumber-Sumber Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Dalam Lima Tahun Terakhir, Jurnal Manajemen dan Fiskal, Volume V, Nomor 2, Jakarta